

Aplikasi Akuntansi Berbasis PSAK No. 45 Untuk Menciptakan Good Governance Keuangan Masjid

Hadi Pramono¹, Nur Isna Inayati², Feri Wibowo³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Muhammadiyah Purwokerto

³Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹pramono.hadi.75@gmail.com

²nurisna.inayati@gmail.com

³feriwibowo@ump.ac.id

ABSTRAK (Dalam Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 45 pada masjid dan menghasilkan produk sistem akuntansi masjid berdasarkan PSAK No. 45 berbasis software Ms. Excel. Penggunaan software excel ini dikarenakan excel sudah terkenal. Fitur excel mudah dipahami dan fleksibel digunakan sebagai aplikasi akuntansi, mulai dari penjurnalan hingga penyusunan laporan keuangan. Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini berupa aplikasi sistem akuntansi yang dapat diterapkan di semua masjid sehingga memudahkan pengurus masjid dalam mengelola masjid sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci :

Akuntansi Masjid, Excel , PSAK No.45,

ABSTRACT (In English)

This study aims to analyze the application of PSAK No. 45 in the mosque and produce a mosque accounting system product based on PSAK No. 45 based on Ms. Excel software. The use of Excel software is because excel is well known. The Excel feature is easy to understand and flexible to use as an accounting application, from journaling to compiling financial reports. The practical benefits obtained from this research are in the form of an accounting system application that can be applied in all mosques, making it easier for the mosque administrator to manage mosques following the principles of good governance..

Keywords :

Excel, Mosque Accounting, PSAK No. 45

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan komposisi penduduk mayoritas adalah masyarakat beragama Islam. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 236,53 dari total 272,23 juta jiwa, atau 86,88% beragama Islam. Jumlah muslim yang mayoritas tentu akan dibarengi dengan banyaknya jumlah masjid. Menurut PIC SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Kemenag RI, per Maret 2021 jumlah masjid di Indonesia sebanyak 741.991 masjid. Jumlah ini merupakan jumlah resmi yang terdaftar di SIMAS, namun masih banyak masjid yang belum resmi didaftarkan di sistem tersebut. Keberadaan masjid bagi umat muslim sangatlah penting, selain untuk ibadah sholat berjamaah, juga untuk kegiatan keislaman yang lain. Dalam mengelola kegiatan-kegiatan tersebut tentu dibutuhkan dana. Masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nir-laba, sehingga sumber dana masjid berasal dari masyarakat atau umat dalam bentuk infak, sodaqoh atau sumbangan, sehingga pelaporan dana infak, sodaqoh, dan sumbangan tersebut menjadi keharusan dari pihak takmir masjid. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/jamaah terhadap pengelolaan dana masjid adalah dengan menerapkan good governance/tata kelola yang baik (Rahayati et al., 2020). Beberapa unsur good governance antara lain transparansi dan akuntabilitas. Karena sumber dana masjid berasal dari jamaah maka transparansi

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masjid menjadi keharusan. Pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan masjid menjadi aspek penting, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat/jamaah menghindari fitnah terhadap masjid (Suarni & Mira, 2022). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Selain permasalahan pengelolaan dan pelaporan keuangan, secara umum takmir masjid juga jarang mencatat aset yang dimiliki masjid. Hal ini menjadikan masjid tidak pernah mengetahui dan melaporkan berapa aset yang dimiliki, walaupun secara kasat mata, masjid pasti memiliki aset tetap baik berupa tanah, bangunan, peralatan, maupun aset lainnya.

LANDASAN TEORITIS

A. *Good Corporate Governance*

Definisi *Corporate Governance* yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *corporate* dan *governance*. secara bahasa, istilah *corporate* adalah *united in a single group* sedangkan *governance* adalah *the activity or manner of governing*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengartikan *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan dalam pengelelolannya.

Di buku *Good Corporate Governance* pada Lembaga Zakat mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah sebagai sebuah alur proses dan struktur yang digunakan demi meningkatkan keberhasilan, dan akuntabilitas organisasi yang bertujuan untuk menambah nilai pemisahan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika (Manossoh, 2016). Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 definisi *Good Governance* adalah “pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Tingkat kepentingan *Good Governance* sekarang ini telah berubah menjadi sesuatu hal yang diutamakan dalam rencana peningkatan paradigma pemerintahan dan pembangunan yang akan datang. Penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

B. *PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*

Ciri-ciri lembaga nirlaba tentunya berbeda dengan lembaga atau organisasi bisnis. Ciri yang paling membedakan yang mendasar terletak pada cara lembaga atau organisasi tersebut mendapatkan resource yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas organisasinya. Lembaga nirlaba mendapatkan resource dari iuran atau sumbangan para anggota dan para donatur lain yang tidak meniatkan mengharap upah atau imbalan dalam bentuk apapun dari lembaga atau organisasi tersebut (Saptowinarko, 2012) (Dinanti & Nugraha, 2018). Pada lembaga nirlaba muncul aktivitas berupa transaksi tertentu yang jarang terjadi pada lembaga atau organisasi bisnis, misalnya mendapatkan penerimaan sumbangan. Akan tetapi dalam praktik lembaga nirlaba sering tampil dalam bermacam bentuk yang seringkali cenderung sulit dibedakan dengan lembaga bisnis. Beberapa bentuk lembaga non-profit, walaupun tidak berkepemilikan, lembaga tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari sumber utang dan kebutuhan aktivitas operasinya dari pemasukan atas jasa yang ditawarkan kepada publik. Sehingga, pengukuran jumlah dan kepastian arus pemasukan kas menjadi tolak ukur kinerja yang substantif bagi para pengguna dokumen laporan keuangan lembaga tersebut. Lembaga seperti ini memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama dengan lembaga bisnis pada umumnya. Tujuan PSAK 45 ini adalah untuk mengelola dan mengatur pelaporan dan pencatatan transaksi keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan ini, laporan keuangan lembaga nirlaba akan mudah dipahami, mempunyai relevansi, dan memiliki daya banding tinggi (Aji, 2017). Pelaporan dan pencatatan transaksi keuangan lembaga nirlaba meliputi beberapa hal yaitu laporan posisi keuangan di setiap akhir periode, laporan setiap aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan laporan keuangan (Dewi & Farina, 2022) (Nurfaisyah & Herawati, 2022).

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah untuk menyajikan ringkasan informasi terkait aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai keterkaitan di antara unsur-unsur tersebut pada periode waktu tertentu. Setiap informasi dalam laporan posisi keuangan yang dipakai bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para donatur, anggota, kreditur dan pihak lain untuk pertimbangan penilaian: a)

kemampuan lembaga untuk menyediakan jasa secara terus-menerus dan b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kecakapan untuk menjalankan kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan inti dari laporan aktivitas adalah menyediakan berbagai informasi terkait dengan (a) pengaruh setiap transaksi yang terjadi dan peristiwa lain yang dapat mengubah jumlah dan sifat dari aktiva bersih, (b) keterkaitan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program-program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para donatur, anggota, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) menilai dan mengevaluasi performance dalam periode waktu tertentu, (b) mengevaluasi dan menilai upaya, kemampuan, dan keberlanjutan organisasi dan memberikan jasanya, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pimpinan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu.

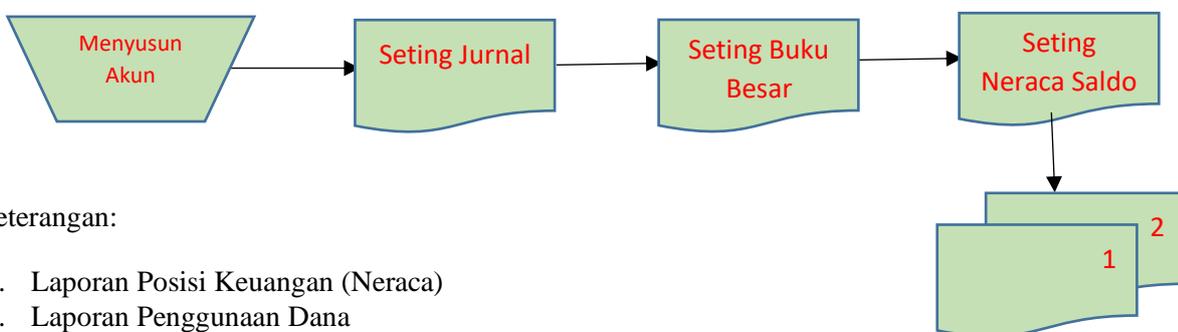
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, mengenai penerapan PSAK Nomor 45 di masjid, karena masjid merupakan lembaga sektor publik yang mengelola keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh masjid di Indonesia. Sedangkan sampel penelitian, yang akan diobservasi, adalah masjid yang ada di Purwokerto. Pemilihan sampel dilakukan secara random karena karakteristik masjid dalam mendapatkan sumber dana sama, yaitu berasal dari jamaah.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, sehingga metode yang digunakan adalah:

- Langkah 1 → Melakukan observasi ke beberapa masjid (semua anggota tim)
- Langkah 2 → Melakukan wawancara dengan ketua takmir dan bendahara masjid (semua anggota tim)
- Langkah 3 → Menginventarisir permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan dana masjid (semua anggota tim)
- Langkah 4 → Menerapkan PSAK No. 45 dalam pengelolaan keuangan masjid (Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti 1)
- Langkah 5 → Membuat aplikasi akuntansi berbasis PSAK No. 45 dengan menggunakan Ms. Excel untuk pencatatan dan pelaporan keuangan masjid (semua anggota tim)
- Langkah 6 → Uji coba penerapan aplikasi akuntansi berbasis PSAK No. 45 dengan Ms. Excel ke masjid (semua tim)
- Langkah 7 → Evaluasi hasil uji coba (semua anggota tim)
- Langkah 8 → Aplikasi Akuntansi Excel berbasis PSAK No 45 di serahkan ke masji (semua anggota tim)
- Langkah 9 → Publikasi dan pengurusan karya cipta (semua anggota tim)

Untuk Proses pembuatan sistem akuntansi dengan langkah seperti pada Gambar 1. sebagai berikut:



Keterangan:

- 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2. Laporan Penggunaan Dana

Gambar 1. Bagan Alur Pembuatan Aplikasi Akuntansi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi

Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan sistem akuntansi sektor publik untuk masjid dengan basis Ms. Excel. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan observasi di beberapa masjid untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dengan penerapan PSAK No. 45. Hasil observasi menunjukkan bahwa masjid belum menggunakan aplikasi dalam mengelola keuangan masjid, demikian juga masih belum memahami PSAK No. 45.

B. Pembuatan Sistem Akuntansi Masjid

Ada beberapa langkah dalam menyusun aplikasi akuntansi masjid berbasis Excel, yaitu:

1. Memahami konsep dasar akuntansi, yaitu:

$$Aset = Hutang + Modal$$

Atau

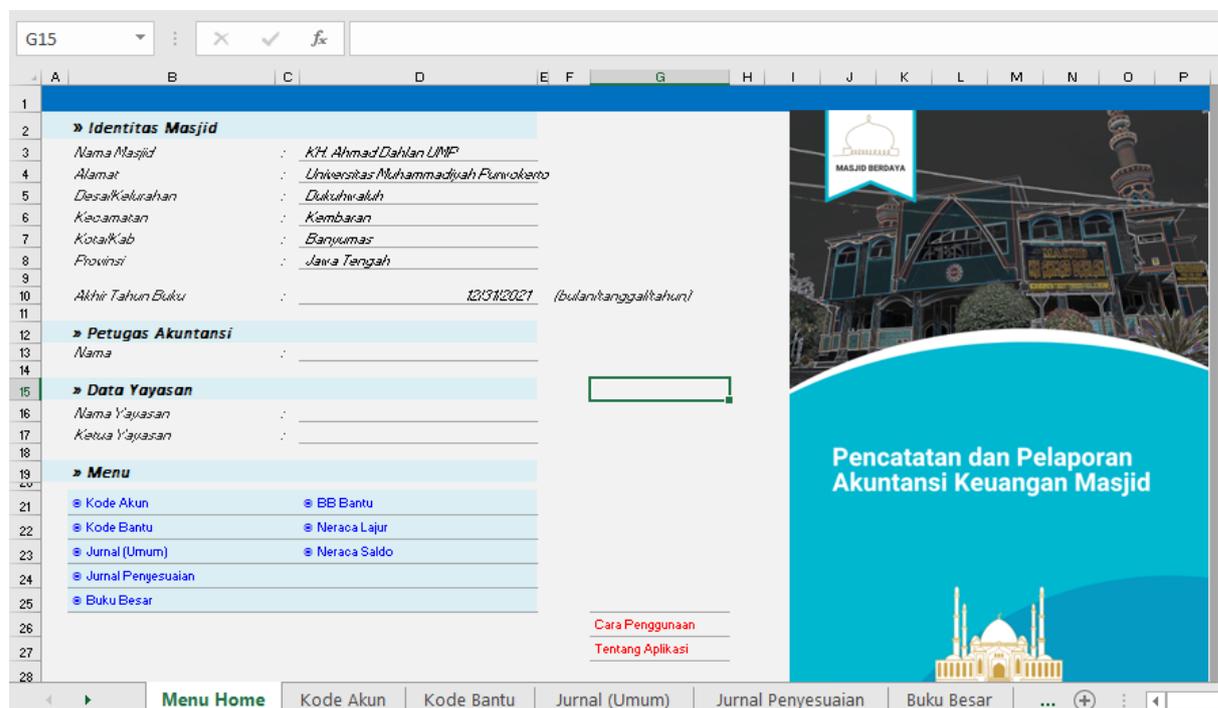
$$Aset = Hutang + Modal Awal + Pendapatan - Beban$$

Atau

$$Aset + Beban = Hutang + Modal Awal + Pendapatan$$

2. Melakukan seting awal berupa mengisi identitas masjid

Seting awal dilakukan di halaman utama aplikasi atau "Menu Home". Halaman ini digunakan untuk mengisi data lengkap dari identitas masjid yang akan menggunakan aplikasi sistem akuntansi berbasis Excel yang telah dibangun. Selain data identitas masjid, di halaman ini juga terdapat menu utama yang digunakan mengakses fungsional dari sistem akuntansi ini seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Halaman Utama (Menu Home) Sistem Akuntansi Keuangan Masjid.

3. Membuat dan menyusun kode akun dan nama akun

Halaman selanjutnya yang dapat diakses adalah halaman "Kode Akun". Di halaman ini pengurus masjid dapat membuat dan menyusun kode akun dan nama akun. Hal ini penting, karena sebelum proses transaksi selanjutnya, kode dan nama akun harus sudah terdata dengan baik. Halaman kode akun seperti terlihat pada Gambar 3.

NO	KODE	NAMA AKUN	POS SALDO	POS LAPORAN	SALDO AWAL DEBET	SALDO AWAL KREDIT
1	1111	Kas	Debet	Neraca	Rp3,000,000.00	
2	1112	Bank Syariah Indonesia	Debet	Neraca	Rp5,000,000.00	
3	1113	Setara Kas	Debet	Neraca	Rp400,000.00	
4	1114	Deposito	Debet	Laba Rugi	Rp12,000,000.00	
5	1115	Piutang Seragam	Kredit	Neraca		Rp15,000,000.00

Gambar 3. Halaman Kode Akun.

4. Menyusun Daftar Kode Bantu

Halaman “Kode Bantu” digunakan untuk menyusun daftar kode bantu yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid. Kode bantu ini juga perlu dilakukan di awal aplikasi akan digunakan. Gambar 4. Merupakan halaman “Kode Bantu.”

NO	KODE	NAMA	STATUS	SALDO AWAL
1	P001	Contoh Bantu 1	Piutang	Rp10,000,000.00
2	P002	Contoh Bantu 2	Piutang	Rp12,000,000.00
3	P003	Contoh Bantu 3	Piutang	Rp2,000,000.00
4	PK001	contoh Bantu 4	Piutang	Rp21,000,000.00
5	PK002	contoh Bantu 5	Piutang	Rp1,000,000.00
6	PK003	contoh Bantu 6	Utang	Rp23,000,000.00
7	U001	contoh Bantu 7	Utang	Rp20,000,000.00
8	U002	contoh Bantu 8	Utang	Rp100,000.00
9			-	
10			-	
11			-	
12			-	
13			-	
14			-	
15			-	
16			-	
17			-	
18			-	
19			-	
20			-	
21			-	
22			-	
23			-	

Gambar 4. Halaman Kode Bantu.

5. Menyusun Jurnal Umum

Halaman “Jurnal Umum” digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di masjid. Pada halam ini juga terdapat keterangan “balance” jika antara debet dan kredit sesuai. Jika tidak maka akan muncul keterangan “tidak balance, cek jurnalnya”. Halaman “jurnal umum seperti terlihat pada Gambar 5.

NO	TANGGAL	KODE AKUN	NAMA AKUN	KODE BANTU	DEBET	KREDIT
1	6/14/2022	1111	Kas	P001	Rp1,000,000.00	
2	6/15/2022	1113	Infak Jamaah	P002		Rp1,000,000.00
3	6/16/2022	1112	Bank Syariah Indonesia	P002	Rp10,000.00	
4	6/16/2022	1111	Kas	PK001		Rp10,000.00
5	6/19/2022	1114	Biaya Listrik dan Air	P002	Rp200,000.00	
6	6/20/2022	1111	Kas	P003		Rp200,000.00
7			-			
8			-			
9			-			
10			-			
11			-			
12			-			
13			-			
14			-			
15			-			
16			-			
17			-			
18			-			

Gambar 5. Halaman Jurnal Umum.

6. Menyusun Jurnal Penyesuaian

Halaman Jurnal penyesuaian seperti terlihat pada Gambar 6. Merupakan halaman untuk menginputkan transaksi penyesuaian.

NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	KODE BANTU	DEBET	KREDIT
1	6/14/2022	001/06/MAD/2022	Saldo Awal	1115	Piutang	P001	Rp1,000,000.00	
2	6/15/2022	001/06/MAD/2023	Contoh 1	1113	Infak Jamaah	P001		Rp1,000,000.00
3					0			
4					0			
5					0			
6					0			
7					0			
8					0			
9					0			
10					0			
11					0			
12					0			
13					0			
14					0			
15					0			
16					0			
17					0			
18					0			
19					0			
20					0			

Gambar 6. Halaman Jurnal Penyesuaian.

7. Menyusun Buku Besar

Halaman “Buku Besar” merupakan halaman yang memperlihatkan semua transaksi yang terjadi. Halaman ini menyediakan fungsi cetak yang dapat disesuaikan dengan kelompok transaksi berdasarkan kode akun seperti terlihat pada Gambar 7.

TANGGAL	BUKTI	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
6/14/2022	001/05/MAD/2022	Saldo Awal	Rp1,000,000.00	Rp0.00	Rp1,000,000.00
			Rp0.00	Rp0.00	Rp1,000,000.00
6/16/2022	001/05/MAD/2025	Contoh 4	Rp0.00	Rp10,000.00	Rp990,000.00

Gambar 7. Halaman Buku Besar.

8. Menyusun Laporan Keuangan - Laporan Posisi Keuangan
Halaman “Laporan Posisi Keuangan” digunakan untuk mencetak posisi keuangan pertanggal cetak. Hal ini bisa dilakukan perkode akun atau semua akun seperti terlihat pada Gambar 8.

KODE AKUN	NAMA AKUN	SALDO	
		Jumlah	
1100	ASET :		
1111	Kas	2,990,000.00	
1112	Bank Syariah Indonesia	5,210,000.00	
1113	Setara Kas	400,000.00	
1114	Deposito	12,000,000.00	
1115	Piutang Seragam	-	
1116	Tanah	200,000,000.00	
1117	Bangunan	165,000,000.00	
1118	Akumulasi Penyusutan Bangunan	(10,700,000.00)	
1119	Peralatan	15,800,000.00	
1120	Akumulasi Penyusutan Peralatan	(3,000,000.00)	
	Jumlah Aset		387,700,000.00
2200	KEWAJIBAN :		
3300	ASET NETTO :		
3311	Aset Netto Tidak Terikat	220,600,000.00	
3312	Aset Netto Terikat Temporer	165,000,000.00	

Gambar 8. Halaman Laporan Posisi Keuangan

KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian produk terapan ini menghasilkan sistem aplikasi keuangan masjid berbasis ms excel. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk mempermudah pihak takmir masjid dalam mengelola dan melaporkan keuangan masjid secara real time dan mudah untuk diakses oleh jamaah. Untuk rencana ke depan, perlu untuk merancang dan menghasilkan aplikasi keuangan sektor publik, khususnya masjid dengan berbasis android. Sistem

aplikasi berbasis android lebih memungkinkan kemudahan akses karena jamaah dapat mengakses *melalui hand phone* setiap saat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah mendanai penelitian ini melalui kegiatan Penelitian Produk Terapan LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun Anggaran 2022.

REFERENSI

- Aji, I. B. (2017). Analisis Penerapan PSAK No 45 Pada Rumah Sakit Badan Layanan Umum. *Profita*, 2(45), 1–11.
- Dewi, N., & Farina, D. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK Nomor 35 (Studi pada Masjid Nurul Iman Tabek Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota). *JakSya : Jurnal Akuntansi Syariaah*, 2(1), 33–48.
- Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 1–8. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1081>
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*.
- Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 206–215.
- Rahayati, A., Syahiza, A., Roshima, S., Azlindawati, H., & Shaamila, S. (2020). Development of framework for good Governance Index for Mosques in Kedah. *Journal of Critical Review*, 7(19), 1–50. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.1041>
- Saptowinarko, M. P. (2012). Penerapan PSAK Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Bunda Surabaya. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.37477/bip.v4i2.152>
- Suarni, A., & Mira, M. (2022). Smart Mosque: Pembuatan Website dan Laporan Keuangan Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. *GIAT: Teknologi Untuk Masyarakat*, 1(1), 48–58. <https://doi.org/10.24002/giat.v1i1.5856>